

# PANDUAN PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASIONAL

**DI BALAI PENYULUHAN KB TAHUN 2024**

SEBAGAI PEDOMAN DALAM PELAKSANAAN  
KEGIATAN PROGRAM BANGGA KENCANA DAN PERCEPATAN  
PENURUNAN STUNTING





# PANDUAN PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASIONAL

**DI BALAI PENYULUHAN KB TAHUN 2024**

SEBAGAI PEDOMAN DALAM PELAKSANAAN  
KEGIATAN PROGRAM BANGGA KENCANA DAN PERCEPATAN  
PENURUNAN STUNTING



62 - 3291 - 2780 - 451



## **PENGARAH :**

Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi  
Drs. Sukaryo Teguh Santoso, MPd

## **PENANGGUNGJAWAB :**

Plt. Direktur Bina Penggerakan Lini Lapangan  
Mohamad Iqbal Apriansyah, SH, MPH

## **TIM PENULIS :**

Ridwan Fadjri Nur, SE  
dr. Mila Yusnita  
Yunita, S.Sos  
Gyakuni Firsty Niko, S.K.M  
Dessy Christian, S.I.A  
Ari Nurdin, SM  
Senya Rahmania Luhri, A.Md

## **TIM KONTRIBUTOR :**

Biro Perencanaan  
Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak  
Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga  
Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan  
Direktorat Bina Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana

# KATA SAMBUTAN

## Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi

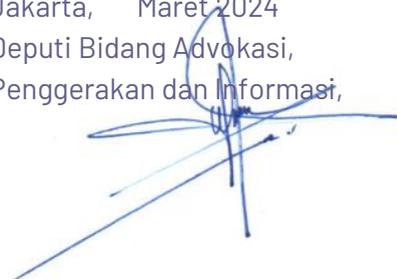
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat menyusun Buku Panduan Pelaksanaan Kegiatan Operasional di Balai Penyuluhan KB Tahun 2024 sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting. Dalam era yang dipenuhi dengan dinamika dan tantangan, penting bagi kita untuk memiliki panduan yang jelas dan terperinci untuk mengelola biaya operasional terkait dengan program Keluarga Berencana.

Melalui buku panduan ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program KB, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah KB dan pelaksana teknis tingkat lapangan dapat memahami secara menyeluruh mengenai aspek biaya yang terlibat dalam program ini. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan Program KB dapat dijalankan dengan lebih efektif dan efisien, serta memberikan manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat. Buku Panduan Pelaksanaan Kegiatan Operasional di Balai Penyuluhan KB Tahun 2024 ini disusun, untuk dapat digunakan oleh para pengelola dan pelaksana Program Bangga Kencana di kabupaten/kota dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di Balai Penyuluhan KB, pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan stunting dan peningkatan pengetahuan kader PPKBD dan Sub PPKBD.



Akhir kata, semoga Buku Panduan Pelaksanaan Kegiatan Operasional di Balai Penyuluhan KB Tahun 2024 ini dapat lebih mendukung kelancaran pelaksanaan berbagai menu kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Dana Alokasi Khusus (DAK). Sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara selaras dan berkesinambungan dari mulai tingkat pusat sampai kepada kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan serta manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan keluarga.

Jakarta, Maret 2024  
Deputi Bidang Advokasi,  
Penggerakan dan Informasi,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned over the text of the official title.

**Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd**

# **KATA PENGANTAR**

## **DIREKTUR BINA PENGGERAKAN**

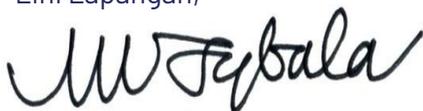
### **LINI LAPANGAN**

Sebagai upaya terwujudnya pencapaian kegiatan dan program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting perlu didukung dengan dana operasional BOKB. Tentunya langkah-langkah percepatan yang berawal dari jenjang tingkat lini lapangan yang diselaraskan dengan program-program kebijakan yang telah ditetapkan dari tingkatan pusat diperlukan sinergitas, dalam hal pelaksanaan kegiatan, untuk di tingkatan kecamatan sebagai pusat pengendali operasional Program Bangga Kencana di lini lapangan adanya Balai Penyuluhan KB di tingkat kecamatan dan juga sampai dengan tingkatan desa/kelurahan adanya dukungan operasional kegiatan SDM lini lapangan yaitu para kader PPKBD dan Sub PPKBD.

Adapun kegiatan yang dimaksud diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan remaja, calon pengantin, Pasangan Usia Subur (PUS) serta akses pelayanan penunjangnya melalui: (1) peningkatan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas; (2) peningkatan capaian peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); (3) peningkatan peran serta keluarga dan masyarakat dalam program Bangga Kencana di lini lapangan; (4) pemanfaatan data dan informasi Program Bangga Kencana di wilayah kecamatan untuk perencanaan pembangunan semua bidang pembangunan; dan (5) mempercepat penurunan prevalensi balita stunting melalui optimalisasi intervensi spesifik dalam pemenuhan gizi ibu hamil dan balita serta penguatan surveilans gizi, edukasi dan pengasuhan.

Dengan terbitnya Buku Panduan Pelaksanaan Kegiatan Operasional di Balai Penyuluhan KB Tahun 2024 ini diharapkan mampu memberikan informasi lebih detail hingga dapat terselenggara dengan baik. Kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini diucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Harapan lainnya, semoga dengan diterbitkannya buku ini seluruh Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Jakarta, Maret 2024  
Plt. Direktur Bina Penggerakan  
Lini Lapangan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M Iqbal' in a cursive style.

**Mohamad Iqbal Apriansyah, SH, M.PH**

# Daftar Isi

Kata Sambutan	I
Kata Pengantar	III
Daftar Isi	V
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	4
C. Tujuan	5
D. Ruang Lingkup	6
E. Sasaran	6
F. Batasan Pengertian	7
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN BALAI PENYULUHAN KB</b>	
A. Peran dan Fungsi Balai Penyuluhan	12
B. Perencanaan, Pembentukan dan Pengorganisasian Balai Penyuluhan KB	15
<b>BAB III KEGIATAN-KEGIATAN OPERASIONAL DI BALAI PENYULUHAN KELUARGA BERENCANA</b>	
A. Kegiatan Operasional Penyuluhan Program dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan	18
B. Biaya Operasional Pengolahan Data	22
C. Biaya Operasional Langganan Daya dan Jasa	23
D. Biaya Operasional Jasa Tenaga Keamanan dan pramusaji Balai Penyuluhan KB	24
E. Biaya Operasional Konseling Satyagatra di Balai Penyuluhan KB	24

<b>BAB IV KEGIATAN DUKUNGAN OPERASIONAL PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI LINI LAPANGAN</b>	
A. Operasional Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting	<b>28</b>
B. Operasional Pencatatan hasil pemantauan pendampingan sasaran berisiko stunting	<b>32</b>
C. Operasional Mini Lokakarya Tingkat Kecamatan	<b>34</b>
<b>BAB V DUKUNGAN OPERASIONAL PEMBINAAN PROGRAM BANGGA KENCANA OLEH KADER (PPKBD DAN SUB PPKBD)</b>	
A. Kegiatan Dukungan Operasional Pembinaan Program Bangga Kencana oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD)	<b>38</b>
B. Kegiatan Operasional Pelaksanaan KIE	<b>39</b>
<b>BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN SERTA LINGKUP PEMBIAYAAN</b>	
A. Pemantauan	<b>40</b>
B. Evaluasi	<b>40</b>
C. Pelaporan	<b>41</b>
D. Lingkup Pembiayaan	<b>41</b>
<b>BAB VII PENUTUP</b>	<b>42</b>
LAMPIRAN 1 Data Balai Penyuluhan KB	<b>44</b>
LAMPIRAN 2 Form K/O/BP	<b>45</b>
LAMPIRAN 3 Form K/O/TPK/2022)	<b>46</b>
LAMPIRAN 4 Spesifikasi DAK Fisik Balai Penyuluhan KB	<b>47</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Amanat Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada pasal 56 ayat (1) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki tugas melaksanakan Pengendalian Penduduk yang dijalankan dalam bentuk Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) bertujuan untuk mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang seimbang merupakan program yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai isu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024. Selain itu, dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan Stunting, Kepala BKKBN juga diberikan amanat sebagai Ketua Pelaksana Penurunan Stunting untuk dapat mengkoordinasikan Penyelenggaraan percepatan Penurunan stunting yang ditargetkan sebesar 14% pada Tahun 2024. Adanya Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tersebut mengarahkan semua pihak untuk melaksanakan percepatan penurunan stunting secara konvergen dan terintegrasi.

Selanjutnya untuk melaksanakan 2 (dua) hal tersebut, baik program pengendalian penduduk dan penurunan stunting, program kegiatan dan pengalokasian anggaran di daerah yang sifatnya untuk peningkatan akses serta pelayanan langsung kepada masyarakat dan melalui koordinasi dengan berbagai pihak di seluruh tingkatan daerah dialokasikan melalui dukungan dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional keluarga berencana tahun anggaran 2024.

BOKB merupakan bagian dari DAK Nonfisik yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, didalamnya termasuk pengelolaan DAK. DAK adalah bagian dari transfer ke daerah dan dana desa yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. BOKB merupakan DAK Nonfisik yang digunakan untuk membantu operasional layanan publik di daerah.

Adapun kegiatan yang dimaksud diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan remaja, calon pengantin, Pasangan Usia Subur (PUS) serta akses pelayanan penunjangnya melalui: (1) peningkatan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas; (2) peningkatan capaian peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); (3) peningkatan peran serta keluarga dan masyarakat dalam program Bangga Kencana di lini lapangan; (4) pemanfaatan data dan informasi Program Bangga Kencana di wilayah kecamatan untuk perencanaan pembangunan semua bidang pembangunan; dan (5) mempercepat penurunan prevalensi balita stunting melalui optimalisasi intervensi spesifik dalam pemenuhan gizi ibu hamil dan balita serta penguatan surveilans gizi, edukasi dan pengasuhan.



Salah satu program kegiatan yang mendapatkan dukungan anggaran dana alokasi khusus BOKB yang diupayakan langsung memberikan dampak terhadap pencapaian program bangga kencana dan percepatan penurunan stunting yaitu antara lain melalui pendanaan BOKB di Balai Penyuluhan KB yang berada di tingkat kecamatan untuk dapat dimanfaatkan oleh lintas sektor, tenaga lini lapangan maupun masyarakat untuk berbagai macam aktivitas dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, pembahasan permasalahan baik mengenai program Bangga Kencana maupun program percepatan penurunan Stunting. Melalui Balai Penyuluhan KB yang berada di tingkat kecamatan diupayakan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan Program Bangga Kencana dan pengetahuan tentang pencegahan penurunan Stunting yang terdekat.

Untuk memaksimalkan peran Balai Penyuluhan KB dan percepatan penurunan Stunting tersebut perlu adanya dukungan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan di lini lapangan untuk itu BKKBN mengalokasikan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dalam melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan guna memberikan dukungan terhadap upaya pencapaian target/sasaran prioritas Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) serta percepatan penurunan Stunting. Begitu pentingnya peran Balai Penyuluhan KB di tingkat kecamatan, sehingga perlu adanya pengembangan Balai Penyuluhan KB di Tingkat kecamatan, dukungan ini diwujudkan melalui dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang KB. Pengembangan Balai Penyuluhan KB di tingkat kecamatan tersebut sebagai Pusat Pengendali Manajemen Operasional Program Bangga Kencana di Lini Lapangan.

Untuk mendukung hal tersebut berikut dituangkan dan diperkuat dalam Panduan Pelaksanaan Kegiatan Operasional Program Bangga Kencana di Balai Penyuluhan KB dan Percepatan Penurunan Stunting ini yang akan menjelaskan lebih rinci tentang kegiatan-kegiatan yang termasuk ke dalam pembiayaan operasional di Balai Penyuluhan KB dan Percepatan Penurunan Stunting melalui lini lapangan.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting;
9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 14 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknik Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024;

10. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 15 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera;
11. Lampiran Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023.

### **C. Tujuan**

#### 1. Tujuan Umum

Secara umum, Buku Panduan Pelaksanaan Kegiatan Operasional di Balai Penyuluhan KB Tahun 2024 bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota serta pengelola dan pelaksana Program dalam melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan guna memberikan dukungan terhadap upaya pencapaian target/sasaran prioritas Bangga Kencana.

#### 2. Tujuan Khusus

Secara khusus, Buku Panduan Pelaksanaan Kegiatan Operasional di Balai Penyuluhan KB Tahun 2024 memiliki tujuan antara lain:

1. Meningkatkan fungsi Balai Penyuluhan KB sebagai pusat kendali di tingkat kecamatan yang memberikan pelayanan dalam Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan Stunting;
2. Terlaksananya Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting melalui lini lapangan.
3. Terlaksananya Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting di Desa/Kelurahan melalui pendampingan, pemantauan dan penggerakan KIE oleh Tim Pendamping Keluarga termasuk Kader KB (PPKBD dan Sub PPKBD).



## D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Buku Panduan Pelaksanaan Kegiatan Operasional di Balai Penyuluhan KB Tahun 2024 meliputi ruang lingkup kegiatan operasional di Balai Penyuluhan KB, kegiatan percepatan Stunting dan pergerakan, komunikasi, informasi dan edukasi.

## E. Sasaran

Sasaran pengguna Buku Panduan Pelaksanaan Kegiatan Operasional di Balai Penyuluhan KB Tahun 2024 adalah :

1. Pengelola Program Bangga Kencana di Tingkat Pusat dan Provinsi (BKKBN dan Perwakilan BKKBN Provinsi).
2. Pengelola Program Bangga Kencana di Tingkat Kabupaten/Kota (Dinas Bidang Pengendalian Penduduk dan KB).
3. Pengelola dan Pelaksana Balai Penyuluhan KB, seperti Ka. UPT Balai Penyuluhan/ Koordinator, Penyuluh KB/PLKB ASN dan PLKB Non ASN.
4. Tim Penggerak PKK Tingkat Kecamatan.
5. Pelaksana Program di tingkat Desa/Kelurahan, seperti Kader KB (PPKBD/Sub PPKBD)



## **F. Batasan Pengertian**

1. Balai Penyuluhan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Balai Penyuluhan KB adalah pusat pengendalian operasional dan pelayanan Program Bangga Kencana di tingkat kecamatan.
2. Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut BOKB adalah DAK Nonfisik Sub Bidang Keluarga Berencana yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan kewenangan daerah dalam mendukung upaya pencapaian sasaran prioritas Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana.
3. Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan yang selanjutnya disebut IMP adalah wadah masyarakat yang berperan serta dalam pengelolaan program Bangga Kencana baik dalam bentuk kelompok/organisasi maupun perorangan yang mempunyai pengaruh di masyarakat.
4. Kegiatan Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Daring adalah kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan jejaring komputer atau internet.
5. Kegiatan Luar Jaringan yang selanjutnya disebut Luring adalah kegiatan yang dilakukan secara tatap muka langsung tanpa menggunakan fasilitas jejaring komputer atau internet.
6. Kelompok Kegiatan yang selanjutnya disingkat Poktan adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan dan mengelola kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), pembinaan Usaha Ekonomi Keluarga melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga.

7. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disebut Satyagraha adalah wadah kegiatan terpadu yang mudah diakses oleh masyarakat, dengan kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan pelayanan keluarga sesuai siklus hidup yang dilaksanakan dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi, konsultasi dan konseling, pendampingan serta rujukan.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah ibu dan anak, suami dan istri, ayah dan anak, ibu dan anak.
9. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
10. Kependudukan adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
11. Komunikasi Informasi dan Edukasi yang selanjutnya disebut KIE adalah suatu proses intervensi komunikasi yang terencana yang menggabungkan pesan-pesan informasional, pendidikan, dan motivasional yang bertujuan untuk mencapai suatu perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku yang dapat diukur diantara sekelompok audiens sasaran yang jelas melalui penggunaan saluran komunikasi.
12. Operasional Pengolahan Data tingkat kecamatan adalah proses pengolahan data rutin dan non-rutin setiap bulan atau berkala dengan kegiatan utama berupa rekapitulasi data pengendalian lapangan (Dalap), data pelayanan kontrasepsi (Pelkon), serta pemutakhiran data basis data keluarga Indonesia (Pendataan Keluarga) pada Sistem Informasi Keluarga (SIGA) dan data dasar program Bangga Kencana yang dilakukan pada sub menu penyiapan program Bangga Kencana berbasis data oleh kader (PPKBD/Sub PPKBD).

13. Operasional Penyuluhan Keluarga Berencana adalah kegiatan-kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang program Bangga Kencana oleh petugas lapangan (Penyuluh KB/PLKB) dan/atau kader (PPKBD/Sub PPKBD) dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku, keluarga dan/atau masyarakat.
14. Pelayanan KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas melalui pemberian pelayanan Keluarga Berencana (KB) termasuk penanganan efek samping dan komplikasi.
15. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
16. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola Program Bangga Kencana tingkat desa/kelurahan yang ditetapkan/diangkat oleh Kepala Desa/Lurah.
17. Pemutakhiran data adalah proses perubahan data terkini sebagian atau seluruh data anggota keluarga. Pemutakhiran data dilaksanakan setiap ada perubahan sebagian atau seluruh data anggota keluarga hasil pendataan keluarga.
18. Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) adalah rangkaian fungsi manajemen penyelenggaraan program Bangga Kencana yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pengembangan Program Bangga Kencana.
19. Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Penyuluh KB adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh untuk melaksanakan pengelolaan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana.

20. Petugas Lapangan Keluarga Berencana Non Aparatur Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan PLKB Non ASN adalah Pegawai Non ASN atau kontrak daerah atau honorarium daerah yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang dalam melakukan penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan Program Bangga Kencana di wilayah binaan (Desa/Kelurahan) yang diangkat pejabat yang berwenang paling rendah setingkat Kepala Dinas yang menangani bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
21. Pejabat Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut PLKB adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh untuk melakukan pengelolaan teknis lini lapangan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana.
22. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
23. Sub Pembantu Pembina KB Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Sub-PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola Program Bangga Kencana tingkat Dusun/RW yang ditetapkan/diangkat oleh Kepala Desa/Lurah.
24. Pendampingan Keluarga adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi pemberian bantuan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan kepada keluarga dan/atau keluarga berisiko Stunting seperti ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0-59 bulan, serta semua calon pengantin/calon pasangan usia subur melalui pendampingan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah untuk deteksi dini faktor risiko Stunting dan melakukan upaya meminimalisir atau pencegahan pengaruh dari faktor risiko Stunting.

25. Tim Pendamping Keluarga yang selanjutnya disebut TPK adalah sekelompok tenaga yang dibentuk dan terdiri dari Bidan, Kader TP PKK dan Kader KB untuk melaksanakan pendampingan meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial kepada calon pengantin/calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0-59 bulan serta melakukan surveilans keluarga berisiko Stunting untuk mendeteksi dini faktor-faktor risiko Stunting. Dalam berbagai kondisi, komposisi tim pendamping keluarga dapat disesuaikan melalui bekerjasama dengan Bidan dari Desa/Kelurahan lainnya atau melibatkan perawat atau tenaga kesehatan lainnya.



## BAB II

# GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN BALAI PENYULUHAN KB

### A. Peran dan Fungsi Balai Penyuluhan

Balai Penyuluhan KB yang dibangun di wilayah kecamatan yang difungsikan sebagai salah satunya sebagai Pusat Pengendali Operasional Program Bangga Kencana serta percepatan Penurunan Stunting di Lini Lapangan, adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Balai Penyuluhan KB antara lain:

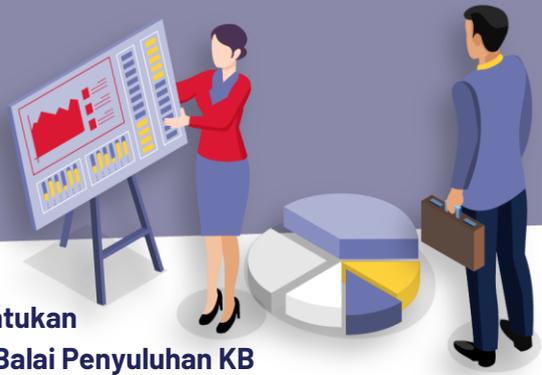
1. Pengelolaan administrasi perkantoran seperti surat menyurat, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pencatatan dan pelaporan.
2. Penyusunan program penyuluhan melalui tahapan sebagai berikut :
  - a. Identifikasi permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan Program Bangga Kencana di lini lapangan;
  - b. Hasil identifikasi permasalahan menjadi bahan utama pembahasan pada pertemuan pengelolaan Balai Penyuluhan KB;
  - c. Program penyuluhan di kecamatan disusun bersama antara Ka. UPT/Koordinator, Penyuluh KB/PLKB dengan kader PPKBD dan Bidang Desa serta pengelola program Bangga kencana Desa/Kelurahan;
  - d. Hasil penyusunan program penyuluhan di kecamatan disahkan oleh Pimpinan Balai.



3. Penyediaan dan penyebarluasan data dan informasi Bangsa Kencana.  
Untuk menyiapkan data dan informasi yang diperlukan seperti data keluarga, data pelayanan kontrasepsi, data pengendalian lapangan dan peta wilayah PUS/Keluarga hasil pendataan, Balai Penyuluhan KB di Kecamatan melakukan pengumpulan data dan informasi dengan cara antara lain: pendataan keluarga dan keluarga berisiko Stunting, akses internet, pengumpulan data lapangan, pengumpulan data hasil survei/penelitian dan konsultasi dengan instansi teknis terkait. Data dan informasi yang terkumpul selanjutnya diolah dan dikemas sesuai dengan fungsi dan sasaran informasi. Kemasan informasi dapat berbentuk lembar informasi (leaflet), folder, poster, brosur, buletin, alat peraga, papan panel, monografi, infografis dan lainnya.
4. Pelaksanaan Pelayanan KB dan KS  
Balai Penyuluhan KB bersifat pelayanan tingkat dasar seperti memberikan promosi/penyuluhan/KIE, konseling. Selanjutnya untuk pelayanan KB dapat dilaksanakan di Fasilitas Kesehatan (Faskes).
5. Pelaksanaan Penyuluhan Program Bangsa Kencana  
Untuk meningkatkan dan memperluas jangkauan KIE Program Bangsa Kencana kepada masyarakat/keluarga, maka Balai Penyuluhan KB tingkat kecamatan sebagai Pusat Penyuluhan Program Bangsa Kencana di lini lapangan. Pelaksana penyuluhan dapat dilakukan oleh Petugas Lapangan yang ada atau memanfaatkan potensi SDM/Mitra Kerja yang ada di lapangan. Agar pelaksanaan kegiatan Penyuluhan berjalan dengan baik, maka sebelum pelaksanaan penyuluhan, perlu disusun : rencana/jadwal pelaksanaan penyuluhan, materi dan metode penyuluhan yang akan digunakan dengan mempertimbangkan muatan lokal/budaya setempat dan sarana serta alat bantu yang diperlukan.

6. Penyelenggaraan Satyagraha Tingkat Kecamatan  
Satyagraha di tingkat kecamatan dilaksanakan di Balai Penyuluhan KB dengan menyediakan pelayanan konsultasi dan konseling keluarga, khususnya 3 (tiga) pelayanan utama dalam rangka percepatan penurunan stunting, yaitu 1) konsultasi dan konseling keluarga balita dan anak; 2) konsultasi dan konseling pra nikah; dan 3) konsultasi dan konseling KB dan kesehatan reproduksi.
  
7. Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Lini Lapangan  
Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pengelola dan pelaksana Program Bangga Kencana di Lini Lapangan, Balai Penyuluhan KB tingkat Kecamatan berfungsi sebagai tempat peningkatan kapasitas bagi pengelola dan pelaksana Program Bangga Kencana di tingkat Kecamatan. Peningkatan kapasitas dapat dilakukan melalui beberapa cara diantaranya seperti pelatihan, orientasi, bimbingan teknis, pemanfaatan teknologi informasi, studi banding dan lomba penyuluhan.
  
8. Pengembangan Program  
Pengembangan Balai Penyuluhan bertujuan untuk menggalang dukungan semua pihak dalam pengelolaan Balai Penyuluhan KB Kecamatan. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam upaya pengembangan Balai Penyuluhan KB antara lain sosialisasi melalui berbagai media, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial dan lomba antar Balai Penyuluhan.





## **B. Perencanaan, Pembentukan dan Pengorganisasian Balai Penyuluhan KB**

### **1. Perencanaan**

Dalam perencanaan Balai Penyuluhan KB antara lain memperhatikan :

- a. Identifikasi potensi sumber daya manusia;
- b. Inventarisasi perkembangan Program Bangga Kencana di tingkat Kecamatan;
- c. Inventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Program Bangga Kencana percepatan penurunan Stunting di lini lapangan;
- d. Menyusun skala prioritas kegiatan;
- e. Menyusun rencana kebutuhan administrasi sarana dan prasarana Balai Penyuluhan KB.

### **2. Pembentukan Balai Penyuluhan KB**

Dalam pembentukan balai penyuluhan di setiap kecamatan dapat dibentuk melalui alih fungsi maupun pembangunan fisik Balai Penyuluhan KB

#### **a. Alih fungsi**

Dalam hal pendirian balai penyuluhan KB melalui alih fungsi dimana sudah tersedianya bangunan/gedung milik kabupaten/kota yang akan difungsikan sebagai Balai Penyuluhan KB dengan memperhatikan perencanaan sebagaimana disebutkan di atas yakni antara lain tersedianya sumber daya mana manusia dan perencanaan kegiatan dan potensi pemanfaatan penggunaan Balai Penyuluhan KB.

## b. Pembangunan Fisik Balai Penyuluhan KB

Dalam hal penyediaan Sarana Prasarana Pendataan dan Penyuluhan KB bagi Balai Penyuluhan KB tingkat kecamatan di 12 Provinsi Prioritas Stunting (1. Aceh; 2. Sumatera Utara; 3. Banten; 4. Jawa Barat; 5. Jawa Timur; 6. Jawa Tengah; 7. Sulawesi Barat; 8. Sulawesi Tenggara; 9. Kalimantan Barat; 10. Kalimantan Selatan; 11. Nusa Tenggara Barat; 12. Nusa Tenggara Timur), Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Adapun spesifikasi sebagaimana lampiran Peraturan Presiden tersebut terlampir dalam panduan ini.

### Kriteria Sasaran pembangunan Balai Penyuluhan KB

- 1) Kecamatan yang telah memiliki Ka. UPT/Koordinator KB Kecamatan;
- 2) Kecamatan yang belum memiliki kantor Ka.UPT/Koordinator KB Kecamatan;
- 3) Kecamatan yang siap menyediakan sebidang tanah untuk pembangunan Balai Penyuluhan KB dengan status tanah jelas/Sertifikat Hak Pakai atau Hak Guna Bangunan sesuai ketentuan masing-masing daerah dan tidak dalam sengketa atau tidak dalam proses peradilan; dan
- 4) Pemilihan lokasi disarankan dibangun di dekat area kantor kecamatan.
- 5) Setiap Kecamatan 1(satu) Balai Penyuluhan KB.



### 3. Pengorganisasian

Struktur organisasi Balai Penyuluhan KB:

- a. Pimpinan Balai (Ka. UPT/Koordinator)
- b. Urusan Ketatausahaan (Staf TU)
- c. Pelaksana Teknis :
  1. Penyuluh KB
  2. PLKB
  3. PLKB Non ASN

## BAB III

# KEGIATAN – KEGIATAN DUKUNGAN OPERASIONAL DI BALAI PENYULUHAN KB

Berdasarkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024, adapun salah satu menu yaitu pembiayaan operasional di Balai Penyuluhan KB. Kegiatan-kegiatan Operasional di Balai Penyuluhan KB sebagai upaya untuk meningkatkan kesertaan ber-KB, meningkatkan kualitas keluarga dan menurunkan angka Stunting, yaitu :

### A. Kegiatan Operasional Penyuluhan Program dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan

Pelaksanaan kegiatan dengan dukungan dana alokasi khusus non fisik sub bidang KB di Balai Penyuluhan KB untuk kegiatan Penyuluhan Program dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan diharapkan memperoleh antara lain sebagai berikut

Tujuan Kegiatan	Output Kegiatan
Untuk mendukung kegiatan Penyuluhan Program Bangsa Kencana dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan dengan tujuan dalam rangka meningkatkan Capaian Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), peningkatan kesertaan ber-KB serta percepatan penurunan stunting.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatnya jumlah kader yang mendapatkan orientasi Program Bangsa Kencana dan Penurunan Stunting;</li><li>2. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan Tenaga Lini Lapangan dan mitra;</li><li>3. Meningkatnya jumlah keluarga yang terpapar Program Bangsa Kencana.</li></ol>

#### Sasaran Kegiatan

<b>Sasaran Kegiatan Penyuluhan Program antara lain</b> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Remaja;</li><li>b. Calon Pengantin;</li><li>c. Pasangan Usia Subur;</li><li>d. Ibu Hamil;</li><li>e. Ibu Pasca salin/Menyusui;</li><li>f. Keluarga yang memiliki baduta dan balita;</li><li>g. Keluarga yang memiliki remaja;</li><li>h. Keluarga yang memiliki lansia;</li><li>i. Keluarga yang tergabung dalam UPPKA;</li><li>j. Lansia.</li></ol>	<b>Sasaran kegiatan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan antara lain</b> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Penyuluh KB/PLKB ASN dan Non ASN;</li><li>b. PPKBD;</li><li>c. Sub PPKBD;</li><li>d. Tim Pendamping Keluarga;</li><li>e. Kader Poktan dan;</li><li>f. Mitra lainnya</li></ol>
--	---

## Kegiatan Penyuluhan Program

<p><b>1</b> Pertemuan penyuluhan secara berkelompok tentang isu-isu kependudukan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Keluarga yang memiliki anak usia 0-59 bulan</li> <li>2) Remaja usia 10-24 tahun yang belum menikah</li> <li>3) Keluarga yang memiliki remaja usia 10-24 tahun yang belum menikah</li> <li>4) Keluarga yang memiliki lansia</li> <li>5) Tokoh Agama</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Seri Buku Pembekalan bagi PKB/PLKB</li> <li>2) Materi e-learning Pendidikan kependudukan jalur informal bagi PKB/PLKB</li> <li>3) Buku Bacaan bagi PKB/PLKB dan Kader</li> <li>4) Seri Buku Kesiapan Berkeluarga</li> <li>5) Seri Buku Khutbah Jumat -Membentuk Keluarga Paripurna di Era Milenial</li> <li>6) Seri Buku Program Bangga Kencana dalam berbagai perspektif Agama</li> <li>7) Seri Buku Pembekalan Program Bangga Kencana Perspektif Agama Kristen bersama Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI)</li> <li>8) <a href="https://cis.bkkbn.go.id/daldukl/">https://cis.bkkbn.go.id/daldukl/</a></li> </ol>
<p><b>2</b> Pertemuan penyuluhan secara berkelompok tentang pembinaan KB Paska Persalinan (KBPP)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pasangan Usia Subur;</li> <li>2) Ibu Hamil dan Paska Persalinan;</li> <li>3) Calon Pengantin;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengetahui KB Implan (<a href="https://archive.org/details/MengenalImplan03">https://archive.org/details/MengenalImplan03</a>)</li> <li>2) Jenis Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (<a href="https://archive.org/details/JenisMKJP03">https://archive.org/details/JenisMKJP03</a>)</li> <li>3) Mari mengenal Hak-hak Reproduksi dalam Keluarga Berencana</li> <li>4) Aman dan sehat menggunakan kontrasepsi</li> <li>5) Leaflet Mari Mengetahui KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran</li> <li>6) Leaflet Hindari IMS Hidup Sehat, Keluarga Bahagia</li> <li>7) Leaflet Kehamilan Pasca Pemakaian Kontrasepsi</li> <li>8) Buku Saku Metode/Alat Kontrasepsi</li> <li>9) Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana No. 18 Tahun 2020 tentang Pelayanan KB Pascapersalinan</li> <li>10) Panduan Strategi Penurunan Kehamilan Tidak Diinginkan</li> <li>11) Videografis KB Pascapersalinan</li> <li>12) Leaflet KB Pascapersalinan</li> <li>13) Fact sheet 4 Terlalu</li> <li>14) Buku Aman dan Sehat Kontrasepsi</li> <li>15) Lembar Balik Kesehatan Reproduksi</li> <li>16) Peraturan Deputi Bidang KBKR NO 1, Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan Bagi Penyuluh KB/PLKB</li> <li>17) <a href="https://cis.bkkbn.go.id/kbkr/">https://cis.bkkbn.go.id/kbkr/</a></li> <li>18) Panduan Praktis Komunikasi, Informasi, dan Edukasi keluarga Berencana Bagi Penyuluh Keluarga Berencana</li> </ol>

3	<p>Pertemuan penyuluhan secara berkelompok tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang balita dan anak serta pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)</p>	<p>1) Ibu Hamil; 2) Keluarga yang mempunyai anak usia 0-23 bulan. 3) Keluarga yang mempunyai anak usia 0-72 bulan</p>	<p>1) Modul Bina Keluarga Balita dan Anak Holistik Integratif (13 Pertemuan) 2) Modul Bina Keluarga Balita Emas (Eliminasi Masalah Anak Stunting) 3) Bahan Penyuluhan BKB bagi Kader "Menjadi Orangtua Hebat dalam Mengasuh Anak Usia 0 - 6 Tahun" 4) Bahan Penyuluhan BKB dan Anak bagi Kader "Menjadi Orangtua Hebat dalam Mengasuh Anak Usia 6 - 10 Tahun" 5) Bahan Penyuluhan BKB dan Anak "Buku Saku Menjadi Orangtua Hebat melalui Pengasuhan 1000 HPK" 6) Bahan Penyuluhan BKB dan Anak bagi Kader "Pengasuhan Bagi Anak yang berkebutuhan Khusus" 7) Alat Permainan Edukasi (APE) : Ular Tangga, Kubus Edukasi. APE Motorik Kasar, Buku Kain Stimulasi, APE Pesan Kunci 8 Fungsi Keluarga, APE Pengenalan Huruf dan Angka; 8) Kalender Pengasuhan 1000 HPK 9) Kartu Kembang Anak (KKA) 10) Lembar Balik Penyuluhan BKB 11) Poster Pintar 12) <a href="https://cis.bkkbn.go.id/kspk/">https://cis.bkkbn.go.id/kspk/</a></p>
4	<p>Pertemuan penyuluhan secara berkelompok tentang kesiapan keluarga dan kesehatan reproduksi</p>	<p>1) Keluarga yang memiliki Remaja 2) Calon Pasangan 3) Remaja</p>	<p>1) Modul Fasilitator BKR "Membantu Remaja Merencanakan Masa Depanmu" 2) Buku Pegangan Kader BKR "Membantu Remaja Merencanakan Masa Depanmu" 3) Buku 1001 Cara Bicara Orang Tua Kepada Remaja; 4) Modul Fasilitator PIK R "Rencanakan Masa Depanmu" 5) Pedoman Pengelolaan PIK Remaja 6) Buku Pegangan Pendidik Sebaya "Rencanakan Masa Depanmu" 7) Modul Pendidik Sebaya "Tentang Kita" 8) Aplikasi Priscavi Sobar Model Deteksi Dini Pencegahan Kanker Serviks</p>
5	<p>Pertemuan penyuluhan secara berkelompok tentang lansia tangguh</p>	<p>1. Kader BKL 2. Anggota Kelompok BKL (Lansia dan Keluarga Lansia) 3. Pengurus BKL</p>	<p>1) 7 (tujuh) Dimensi Lansia Tangguh 2) Menyiapkan Pra Lansia Menjadi Lansia Tangguh 3) Pedoman Perawatan Jangka Panjang (PJP)/Long Term Care (LTC) bagi Lansia Berbasis Keluarga 4) Panduan Center of Excellent (CoE) kelompok BKL 5) Panduan Pelaksanaan Penguatan Pelayanan Ramah Lansia Melalui Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang (PJP) bagi Lansia 6) Panduan Praktis Keluarga Dalam Mendampingi Lansia "Perawatan Gigi dan Mulut Serta Gizi Pada Lansia" 7) Panduan BKL Terintegrasi. 8) <a href="https://cis.bkkbn.go.id/kspk/">https://cis.bkkbn.go.id/kspk/</a></p>
6	<p>Pertemuan penyuluhan secara berkelompok tentang pemberdayaan ekonomi keluarga melalui usaha ekonomi dan pengelolaan keuangan</p>	<p>1. Keluarga akseptor anggota kelompok UPPKA 2. Kader 3. Penyuluh KB/PLKB</p>	<p>1) 8 (delapan) Langkah Tingkatkan Penghasilan Keluarga 2) Perban BKKBN Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor 3) Buku Seri Pengelolaan Keuangan Keluarga 4) Flipchart Pengelolaan Keuangan Keluarga 5) 5 rahasia menjadi kelompok UPPKS sukses 6) Materi tentang kewirausahaan yang dikeluarkan oleh Dinas/Instansi/Lembaga lintas sektor 7) Materi tentang pengelolaan keuangan keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas/Instansi/Lembaga lintas sektor 8) Panduan penerbitan nomor induk berusaha bagi kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA)</p>

Kegiatan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan			
1	Pembinaan Kader PPKBD dan Sub PPKBD	Kader IMP : PPKBD, Sub PPKBD dan/atau Kelompok KB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Panduan Penguatan Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP)</li> <li>2) Panduan IMP dalam Pengelolaan Program Bangsa Kencana</li> <li>3) GESIT (Gerakan Institusi Bangkit)</li> <li>4) Teknik Pembinaan IMP oleh Penyuluh KB</li> <li>5) Pembinaan IMP Seri 10 Kisah Sebatang Pinsil</li> <li>6) Panduan Mekanisme Operasional Lini Lapangan Program Bangsa Kencana bagi Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan dan Kampung Keluarga Berkualitas</li> </ol>
2	Pertemuan peningkatan KIE Program Bangsa Kencana	Kader IMP : PPKBD, Sub PPKBD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Materi Penyuluh KB/PLKB Terampil Berkomunikasi dengan Efektif</li> <li>2) Materi Komunikasi Perubahan Perilaku Melalui Komunikasi Antar Pribadi</li> <li>3) Materi dan Leaflet lainnya</li> </ol>
3	Pertemuan pembinaan tentang pengelolaan data SIGA	Penyuluh KB/PLKB, Kader IMP : PPKBD dan Sub PPKBD, atau mitra kerja lain yang ditugaskan dalam pengelolaan data SIGA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin Pelayanan KB</li> <li>2) Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin Pengendalian Lapangan</li> <li>3) Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi SIGA</li> <li>4) Buku Panduan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi SIGA</li> <li>5) Buku Panduan Teknis Analisis Sederhana Indikator Program Bangsa Kencana</li> <li>6) Buku Pedoman Pendataan Keluarga</li> <li>7) Buku Mekanisme Pengelolaan Data Rutin (Pelayanan KB dan Pengendalian Lapangan)</li> <li>8) Pedoman Mekanisme Pengelolaan Data Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (PBDKI)</li> <li>9) Buku Panduan Pengumpulan dan Pengolahan</li> </ol>
4	Pertemuan pembinaan tentang pembangunan keluarga	kader-kader Kelompok Kegiatan (Poktan) BKB, BKR, BKL, UPPKA serta Pokja Kampung KB serta Penyuluh KB/PLKB, Kader IMP dan/atau mitra kerja yang ditugaskan sebagai pengelola data pelayanan KB dan atau pengendalian lapangan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Materi terkait 1000 HPK</li> <li>2) Materi terkait pengasuhan dan tumbuh kembang balita dan anak</li> <li>3) Materi terkait Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja</li> <li>4) Materi terkait Lansia Tangguh</li> <li>5) Materi terkait Pengelolaan Keuangan Keluarga</li> </ol>
5	Pertemuan Pembinaan Stunting dan Pembinaan Tim Pendamping Keluarga	kader Poktan Program Bangsa Kencana, kader TP PKK, Kader KB dan Bidan desa sebagai bagian dalam Tim Pendamping Keluarga atau pihak-pihak terkait lain	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pedoman Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Dalam Percepatan Pencegahan Stunting.</li> <li>2) Buku Pintar Stunting Panduan Petugas Lini Lapangan</li> <li>3) Buku Panduan Tim Pendamping Keluarga</li> <li>4) Buku Panduan Verifikasi dan Validasi Keluarga Berisiko Stunting</li> <li>5) Buku Saku Audit Kasus Stunting</li> </ol>
6	Pertemuan pembinaan lainnya		

## B. Biaya Operasional Pengolahan Data

Pelaksanaan kegiatan operasional Pengolahan Data di Balai Penyuluhan KB dimaksudkan antara lain sebagai berikut:

Tujuan Kegiatan	Output Kegiatan
Untuk mendukung kegiatan pengolahan data Program Bangsa Kencana dan atau data percepatan penurunan stunting.	1) Data register pengendalian lapangan;
	2) Data register pelayanan kontrasepsi; dan
	3) Data dasar Program Bangsa Kencana dan Percepatan
	4) Penurunan Stunting di Balai Penyuluhan KB
	5) Data Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting

### Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan Biaya Operasional Pengolahan Data diberikan kepada Penyuluh KB, PLKB baik yang berstatus ASN ataupun non ASN, petugas pencatatan dan pelaporan atau Tenaga Lini Lapangan yang kompeten yang ditunjuk sebagai Pengolah Data di Balai Penyuluhan KB.

---

Kegiatan operasional pengolahan data adalah kegiatan untuk mendukung pengolahan data yang dilakukan oleh Penyuluh KB/ PLKB/PLKB Non ASN, Kader IMP dan Mitra Kerja Kecamatan yang ditunjuk sebagai Pengolah Data di Balai Penyuluhan KB, yang mencakup kegiatan antara lain:

No	Kegiatan	Peserta Kegiatan	Materi Pendukung
<b>Kegiatan Pengolahan Data</b>			
1	Pengolahan data register pelayanan kontrasepsi	1) Penyuluh KB 2) PLKB ASN dan NON ASN 3) Kader 4) Petugas Pencatatan dan Pelaporan	1) Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin Pelayanan KB 2) Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin pengendalian lapangan
2	Pengolahan data register pengendalian lapangan	1) Penyuluh KB 2) PLKB ASN dan NON ASN 3) Kader 4) Petugas Pencatatan dan Pelaporan	3) <a href="https://cis.bkkbn.go.id/kspk">https://cis.bkkbn.go.id/kspk</a> 4) <a href="https://cis.bkkbn.go.id/kbkr">https://cis.bkkbn.go.id/kbkr</a>
3	Pengolahan data pemutakhiran rekapitulasi basis data keluarga Indonesia;	1) Penyuluh KB 2) PLKB ASN dan NON ASN 3) Kader 4) Petugas Pencatatan dan Pelaporan	5) <a href="https://cis.bkkbn.go.id/dalduk/">https://cis.bkkbn.go.id/dalduk/</a> 6) <a href="https://cis.bkkbn.go.id/adpi">https://cis.bkkbn.go.id/adpi</a>
4	Pengolahan data dasar Program Bangga Kencana di Balai Penyuluhan KB;	1) Penyuluh KB 2) PLKB ASN dan NON ASN 3) Kader 4) Petugas Pencatatan dan Pelaporan	7) <a href="#">Rumah Baca PKB/PLKB   Facebook</a>
5	Mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan data e-surveillance Stunting	1) Penyuluh KB 2) PLKB ASN dan NON ASN 3) Kader 4) Petugas Pencatatan dan Pelaporan	<a href="#">n/</a>

### C. Biaya Operasional Langgan Daya dan Jasa

Biaya dukungan langganan daya dan jasa adalah biaya untuk membayar listrik dan/atau air yang dipergunakan di Balai Penyuluhan KB untuk setiap bulan atau selama 1 tahun (12 bulan)

### D. Biaya Operasional Jasa Tenaga Keamanan dan pramusaji Balai Penyuluhan KB

Biaya dukungan Jasa Tenaga Keamanan dan Pramusaji adalah biaya untuk 1 (satu) orang tenaga Jasa Keamanan dan 1 (satu) orang Jasa Pramusaji di Balai Penyuluhan KB untuk setiap bulan atau selama 1 tahun (12 bulan).

## E. Biaya Operasional Konseling Satyagatra di Balai Penyuluhan KB

Tujuan Kegiatan	Output Kegiatan
Menyediakan pelayanan konsultasi dan konseling keluarga, khususnya 3 (tiga) pelayanan utama dalam rangka percepatan penurunan stunting, yaitu 1) penggunaan Kartu Kembang Anak (KKA) dalam pemantauan tumbuh kembang balita dan anak pada pelayanan konsultasi dan konseling keluarga balita dan anak; 2) persiapan kehidupan berkeluarga bagi calon pengantin pada pelayanan konsultasi dan konseling pranikah; dan 3) pelayanan KB paska persalinan (KBPP) pada pelayanan konsultasi dan konseling KB dan kesehatan reproduksi.	1) tersosialisasikannya pelayanan Satyagatra yang ada di Balai Penyuluhan; dan 2) jumlah keluarga/ klien yang mendapatkan konsultasi dan konseling di Satyagatra.

### Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah:

- kader-kader yang ada di desa, baik kader IMP, kader kelompok kegiatan (poktan) BKB, BKR, BKL, UPPKA maupun Tim pendamping Keluarga (TPK) yang melaksanakan pendampingan dalam rangka percepatan penurunan stunting;
- pelaksana/ konselor Satyagatra yang dapat berasal dari penyuluh KB/ petugas lapangan KB/ PPPK, guru PAUD, Genre, dan mitra kerja lain yang memiliki kompetensi sesuai dengan jenis pelayanan;
- keluarga-keluarga yang dianggap rentan (berisiko) mengalami permasalahan dalam segala aspek terutama dalam optimalisasi delapan fungsi keluarga.

Sebagaimana tertuang dalam **Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024**, dalam upaya menjalankan program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan pada PPKS di Balai Penyuluhan di 12 provinsi prioritas (lampiran PPKS di Balai Penyuluhan KB) dengan minimal 8 kali dalam satu tahun, untuk tercapainya output tersebut dapat dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Materi Pendukung
Kegiatan Satyagatra di Balai Penyuluhan			
1	<p>Pertemuan sosialisasi/ promosi/ komunikasi, informasi dan edukasi sosialisasi Pelayanan yang ada di Satyagatra:</p> <p>(a) Pelayanan Data dan informasi Kependudukan dan Keluarga; (b) Konsultasi dan Konseling Keluarga Balita dan Anak; (c) Konsultasi dan Konseling Keluarga Remaja dan Remaja; (d) Konsultasi dan Konseling Pra Nikah; (e) Konsultasi dan Konseling Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; (f) Konsultasi dan Konseling Keluarga Harmonis; (g) Konsultasi dan Konseling Keluarga Lansia dan Lansia; (h) Pembinaan Usaha Ekonomi Keluarga; (i) Pelayanan Lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan, sumber daya, dan potensi, khususnya dengan 3 pelayanan utama dalam rangka percepatan penurunan stunting, antara lain (1) penggunaan KKA dalam pemantauan tumbuh kembang balita dan anak, (2) persiapan kehidupan berkeluarga bagi calon pengantin dan pelayanan KB paska persalinan (KBPP)</p>	<p>1) Kader-kader yang ada di desa, baik kader IMP, kader kelompok kegiatan (poktan) BKB, BKR, BKL, UPPKA maupun Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang melaksanakan pendampingan dalam rangka percepatan penurunan stunting;</p> <p>2) Keluarga</p>	<p>1) Biaya konsumsi bagi fasilitator dan peserta; dan/ atau Makanan yang mengandung protein tinggi (telur, susu, dan sebagainya) bagi keluarga berisiko stunting.</p>
2	<p>Konsultasi dan Konseling bagi Keluarga di Satyagatra</p>	<p>Keluarga (klien) yang dianggap rentan (berisiko) mengalami permasalahan dalam segala aspek terutama dalam optimalisasi delapan fungsi keluarga.</p>	<p>1) Biaya fasilitator/ konselor; Konsumsi berupa makanan yang mengandung protein tinggi (telur, susu, dan sebagainya) hanya bagi keluarga/ klien berisiko stunting.</p>

---

3 Pendampingan rujukan bagi keluarga/ klien yang membutuhkan	Keluarga (klien) yang memiliki permasalahan yang dianggap cukup berat dan membutuhkan bantuan tenaga profesional lainnya yang lebih kompeten, seperti psikolog, dokter, therapist, psikiater, pelayanan alkon bagi PUS, dan sebagainya.	Pendampingan rujukan bagi keluarga/ klien yang membutuhkan
--	---	--

---



## BAB IV

# KEGIATAN DUKUNGAN OPERASIONAL PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI LINI LAPANGAN

Sebagaimana Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024 pada Bab II Pasal 3 BOKB merupakan bantuan operasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan KB serta penurunan stunting pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota penerima DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana. Untuk itu salah satu strategi percepatan penurunan Stunting adalah pendekatan keluarga melalui pendampingan keluarga berisiko Stunting untuk mencapai target sasaran, yakni calon pengantin (catin)/calon pasangan usia subur (PUS), ibu hamil dan menyusui sampai dengan pasca salin dan anak usia 0-59 bulan.

Untuk mengawal tersebut dan terlaksananya Program Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten/Kota hingga ke lini lapangan berikut dukungan kegiatan operasional BKKBN yang terkait dengan lini lapangan dan dianggarkan melalui dana BOKB diantaranya yaitu beberapa kegiatan berikut:



## **A. Operasional Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting**

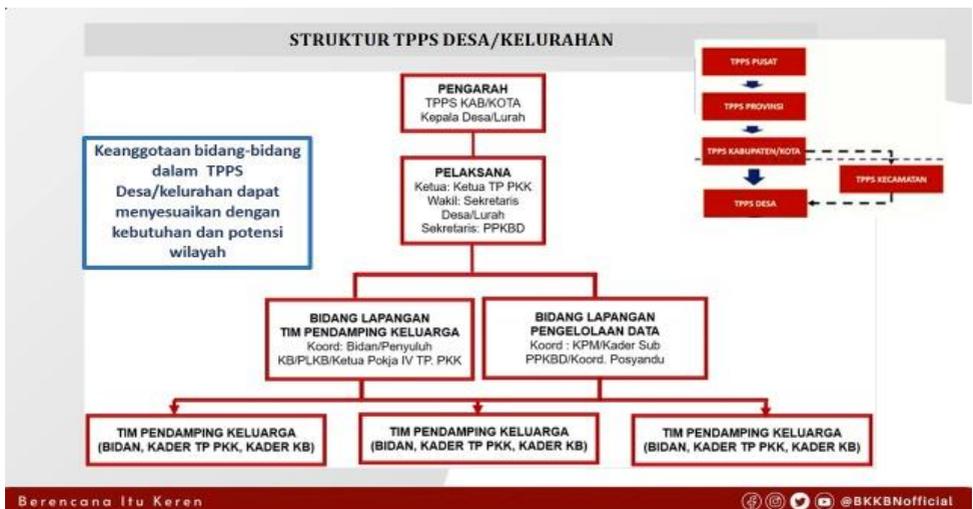
Kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga untuk memantau perkembangan dan melakukan pendampingan kepada calon pengantin/calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0-23 bulan, anak usia 24-59 bulan. Kegiatan pemantauan kepada sasaran sebagaimana dimaksud diatas sebagai upaya mendeteksi dini faktor-faktor risiko stunting serta memfasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial kepada sasaran prioritas percepatan penurunan stunting sesuai dengan kebutuhan sehingga terwujudnya 5 (lima) PASTI: (1) Pastikan penentuan keluarga target sasaran dilaksanakan baik dan benar, (2) Pastikan setiap keluarga dan individu target sasaran masuk dalam daftar target sasaran intervensi, (3) Pastikan setiap sasaran memperoleh pelayanan program intervensi (4) Pastikan setiap sasaran memanfaatkan program intervensi yang dibutuhkan sesuai kriteria program, (5) Pastikan semua pelaksanaan program intervensi tercatat dan dilaporkan sesuai kebutuhan model pelaporan dan tepat waktu.

Dukungan operasional Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting merupakan dukungan pembiayaan operasional yang diberikan kepada Tim Pendamping Keluarga sesuai dengan jumlah Tim Pendamping Keluarga di wilayahnya dalam melakukan kegiatan perencanaan dan pendampingan kepada sasaran catin, keluarga berisiko stunting dan Balita. Pelaksanaan pendampingan tersebut dapat dilakukan 1 (satu) orang atau secara individu sebagai bagian dari Personil TPK maupun pendampingan secara kelompok (seluruh Tim Pendamping Keluarga melakukan pendampingan bersamaan kepada sasaran).

Tujuan Kegiatan	Output Kegiatan
<p>upaya mendeteksi dini faktor-faktor risiko stunting serta memfasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial kepada sasaran prioritas percepatan penurunan stunting sesuai dengan kebutuhan sehingga terwujudnya 5 (Lima) PASTI (1) Pastikan penentuan keluarga target sasaran dilaksanakan baik dan benar, (2) Pastikan setiap keluarga dan individu target sasaran masuk dalam daftar target sasaran intervensi, (3) Pastikan setiap sasaran memperoleh pelayanan program intervensi (4) Pastikan setiap sasaran memanfaatkan program intervensi yang dibutuhkan sesuai kriteria program, (5) Pastikan semua pelaksanaan program intervensi tercatat dan dilaporkan sesuai kebutuhan model pelaporan dan tepat waktu</p>	<p>1) Daftar inventarisasi sasaran dan pemutakhirannya; dan 2) Rekapitulasi Laporan Hasil Pendampingan per kabupaten/kota yang dilaporkan setiap per tiga bulan.</p>

Sasaran Kegiatan
1) Sasaran pendampingan laki-laki dan perempuan sebagai catin/caPUS;
2) Sasaran pendampingan Ibu Hamil;
3) Sasaran pendampingan Ibu pascapersalinan;
4) Sasaran pendampingan Keluarga memiliki anak usia 0-23 bulan (diprioritaskan) dan 24-59 bulan

## Kedudukan Tim Pendamping Keluarga dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting



Sumber: Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024

Pendampingan yang dilakukan oleh TPK dilakukan sejak mendampingi calon pengantin, hingga nanti saatnya calon pengantin menikah dan memiliki balita usia 0-23 bulan. Pendampingan terhadap calon pengantin sangat penting dilakukan untuk memastikan kondisi risiko stunting teridentifikasi, dipahami, ditindaklanjuti dengan treatment dan upaya-upaya kesehatan dalam peningkatan status gizi sehingga pada saat melangsungkan pernikahan berada dalam kondisi ideal.

Pendampingan kepada ibu hamil yang dilakukan oleh tim pendampingan keluarga selama ibu menjalani proses kehamilan sampai dengan waktu melahirkan sehingga ibu dapat melahirkan dengan sehat dan persalinan dilakukan oleh tenaga kesehatan. Pendampingan secara khusus kepada ibu pasca persalinan yang dilakukan oleh kader sampai dengan masa pasca persalinan hingga anak berusia 0-23 bulan. Ibu pasca persalinan dipastikan menggunakan kontrasepsi sebagai upaya meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta memastikan ibu tidak dalam kondisi mengalami infeksi pascapersalinan. Pendampingan kepada baduta dan balita memastikan pemantauan dan perkembangan anak. Kegiatan Pendampingan yang dilakukan di setiap tahapan tersebut adalah sebagai berikut:



No.	Kegiatan	Rincian Kegiatan	Materi Pendukung
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting oleh Tim Pendamping Keluarga			
1	Pendampingan bagi Calon Pengantin/ Calon PUS	<p><b>Calon Pengantin/Calon PUS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Skrining kelayakan menikah 3 bulan sebelum hari H</li> <li>Pendampingan ketat bagi catin/ca PUS tidak lolos skrining</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li><a href="http://bit.ly/PanduanTPK">http://bit.ly/PanduanTPK</a></li> <li><a href="http://bit.ly/3ZLIiCa">http://bit.ly/3ZLIiCa</a></li> <li><a href="http://bit.ly/433KoQS">http://bit.ly/433KoQS</a></li> </ol>
2	Pendampingan bagi Masa Kehamilan	<p><b>Ibu Hamil</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pendampingan skrining awal</li> <li>Pendampingan ketat kehamilan risiko stunting dan patologis</li> <li>Pendampingan kehamilan sehat</li> <li>Pendampingan janin terindikasi risiko stunting</li> <li>Deteksi dini setiap penyakit</li> </ol>	
3	Pendampingan bagi ibu pada saat masa Nifas	<p><b>Ibu Pasca melahirkan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memastikan KBPP, ASI eksklusif, imunisasi, asupan gizi busui dan tidak ada komplikasi masa intes</li> <li>Memastikan kunjungan postnatal care (PNC)</li> </ol>	
4	Pendampingan kepada keluarga dengan Anak usia 0-59 bulan	<p><b>Keluarga dengan anak usia 0-59 bulan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan pendampingan bagi anak usia 0-23 bulan mulai dari kunjungan bayi baru lahir (0 bulan) yang diikuti kunjungan bulanan (satu kali setiap bulan) hingga anak berusia 23 (dua puluh tiga) bulan, utamanya untuk anak 0-23 bulan dengan risiko stunting.</li> <li>Pendampingan anak usia 0-23 bulan dengan riwayat berat badan lahir rendah (&lt;2.500 gram) ataupun panjang badan lahir rendah (&lt;45 cm) ataupun riwayat kelahiran kurang bulan (<math>\leq 37</math> minggu);</li> <li>Memastikan anak usia 0-6 bulan mendapatkan ASI eksklusif;</li> <li>Memastikan anak usia 6-23 bulan mendapatkan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) dengan kandungan gizi lengkap terutama protein hewani dan melanjutkan pemberian ASI sampai usia 2 tahun;</li> <li>Memastikan anak usia 0-59 bulan mendapatkan imunisasi dasar dan lanjutan lengkap sesuai usia;</li> <li>Pemantauan berat badan dan panjang/tinggi badan anak usia 0-59 bulan sesuai dengan standar/usia;</li> <li>Pemantauan perkembangan anak usia 0-59 bulan sesuai standar/usia;</li> <li>Pendampingan keluarga dengan anak usia 0-59 bulan dengan infeksi kronis yang mendapatkan tatalaksana kesehatan;</li> <li>Pendampingan anak usia 0-59 bulan dengan masalah gizi (weight faltering (kenaikan berat badan tidak memadai), underweight (berat badan kurang), gizi kurang, gizi buruk dan stunting) mendapatkan tambahan asupan gizi dan tata laksana kesehatan;</li> <li>Pendampingan anak usia 0-59 bulan dengan masalah perkembangan mendapatkan tatalaksana kesehatan;</li> <li>Edukasi kepada orangtua dengan baduta dan balita untuk menggunakan kontrasepsi;</li> <li>Tim Pendamping Keluarga memastikan keluarga yang memenuhi persyaratan menerima bantuan sosial, menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur;</li> <li>Tim Pendamping Keluarga memastikan keluarga memiliki akses minum air layak, sarana rumah sehat, memiliki jamban sehat.</li> </ol>	

## B. Operasional Pencatatan Hasil Pemantauan Pendampingan Sasaran Berisiko Stunting

Kegiatan pencatatan dan pelaporan hasil pemantauan pendampingan sasaran berisiko stunting dan balita yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga kepada sasaran Berisiko Stunting. Pengamatan kepada sasaran bertujuan untuk memprediksi dan mendeteksi dini factor risiko stunting, memonitor, mengevaluasi dan memperbaiki kondisi sasaran, serta menyediakan data dan informasi kondisi sasaran

Tujuan Kegiatan	Output Kegiatan
1. Pencatatan dilakukan untuk mendapatkan data yang update dan terkini di wilayah desa/kelurahan masing-masing tim pendamping keluarga dilaporkan secara berkala melalui k/0/tpk pada aplikasi SIGA.	➤ Tersedianya data dan informasi terkini tentang kondisi kesehatan Calon Pengantin/Calon Pasangan Usia Subur, Ibu Hamil, Ibu Pasca Persalinan, Anak Usia 0 - 23 bulan untuk mendeteksi secara dini faktor risiko stunting berdasarkan hasil dari pelaksanaan pendampingan keluarga di setiap wilayah.
2. Pencatatan yang dilakukan TPK untuk mendapatkan data pendampingan keluarga berisiko stunting yang update dan terkini di wilayah desa/kelurahan masing-masing tim pendamping keluarga dilaporkan secara berkala melalui pada aplikasi ELSIMIL.	➤ Tersedianya data TPK pada aplikasi SIGA yang dijadikan dasar dalam melakukan orientasi bagi Tim Pendamping Keluarga.

### Sasaran Kegiatan

Tim Pendamping Keluarga Berisiko Stunting sesuai dengan SK yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Pencatatan dan pelaporan hasil pendampingan kepada sasaran berisiko stunting.



No. Kegiatan	Rincian Kegiatan	Materi Pendukung
Kegiatan Pencatatan Hasil Pemantauan Pendampingan Sasaran Berisiko Stunting		
1 Pencatatan Hasil Pemantauan Pendampingan Catin	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pencatatan dan pelaporan melalui aplikasi elsimil</li> <li>▪ melaporkan pelaksanaan pendampingan kepada TPPS Desa/Kelurahan dan selanjutnya TPK menerima Umpan Balik dari TPPS Desa /Kelurahan atas laporan terutama catin/ ca PUS berisiko melahirkan stunting.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <a href="https://elsimil.bkkbn.go.id/">https://elsimil.bkkbn.go.id/</a></li> <li>b. <a href="https://elsimil-pwa.bkkbn.go.id">https://elsimil-pwa.bkkbn.go.id</a></li> </ul>
2 Pencatatan Hasil Pemantauan Pendampingan Ibu Hamil	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pencatatan dan pelaporan melalui aplikasi elsimil</li> <li>▪ melaporkan pelaksanaan pendampingan kepada TPPS Desa/Kelurahan dan selanjutnya TPK menerima Umpan Balik dari TPPS Desa /Kelurahan atas laporan terutama ibu hamil berisiko stunting.</li> </ul>	
3 Pencatatan Hasil Pemantauan Pendampingan Ibu Pasca Persalinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pencatatan dan pelaporan melalui aplikasi elsimil</li> <li>▪ melaporkan pelaksanaan pendampingan kepada TPPS Desa/Kelurahan dan selanjutnya TPK menerima Umpan Balik dari TPPS Desa /Kelurahan atas laporan terutama pascapersalinan berisiko stunting.</li> </ul>	
4 Pencatatan Hasil Pemantauan Pendampingan Balita 0 -23 bulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pencatatan dan pelaporan melalui aplikasi elsimil</li> <li>▪ TPK melaporkan pelaksanaan pendampingan ke TPPS Desa/Kelurahan. Selanjutnya, TPK menerima umpan balik dari TPPS Desa/Kelurahan atas laporan terutama untuk anak usia 0-23 bulan berisiko stunting.</li> </ul>	



## C. Operasional Mini Lokakarya Tingkat Kecamatan

### 1. Rincian Kegiatan :

Operasional Mini Lokakarya Tingkat Kecamatan merupakan kegiatan pertemuan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan dalam rangka mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan pendampingan keluarga dan hasil dari pelaksanaan dan pemantauan pendampingan keluarga di tingkat Kecamatan dan membina (coach) bagi Tim Pendamping Keluarga agar terwujudnya 3 (tiga) standar: (1) Tim Pendamping Keluarga yang terlatih, (2) Tersedia Alat Ukur/Aplikasi Pengukuran untuk sasaran Stunting dan (3) Tersedia dan terlaksananya Prosedural Operasional Percepatan Penurunan Stunting serta terwujudnya 4 (empat) PASTI: (1) Memastikan semua sasaran terdata, (2) Memastikan semua sasaran memperoleh pelayanan, (3) Memastikan semua sasaran memanfaatkan intervensi dari pelayanan dan (4) Memastikan semua pelaksanaan dan pendampingan tercatat dan dilaporkan.

Tujuan Kegiatan	Output Kegiatan
<p>Pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan pendampingan keluarga di tingkat kecamatan dan agar terwujudnya 3 (tiga) standar dan 4 (empat) pasti melalui pembinaan bagi Tim Pendamping Keluarga serta Audit Kasus Stunting tingkat kecamatan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Daftar rencana kerja dan target yang akan dilakukan</li> <li>b. Laporan kondisi pelaksanaan pendampingan keluarga dan program percepatan penurunan Stunting di seluruh desa/kelurahan di satu wilayah kecamatan</li> </ol>

---

### Sasaran Kegiatan

---

Pelaksana minilokakarya tingkat kecamatan yaitu;:

- a. Camat
- b. Kepala Puskesmas
- c. Dokter/Tenaga Kesehatan Puskesmas
- d. Bidan Puskesmas
- e. PKK Kecamatan
- f. Ahli Gizi Puskesmas
- g. TPPS Desa/Kelurahan
- h. Satgas PPS Kab/Kota
- i. Satgas Teknis PPS ( PKB dan PLKB dan/atau TPK

Operasional Mini Lokakarya Tingkat Kecamatan dilakukan minimal 10 (sepuluh) kali dalam setahun. Pertemuan dapat dilakukan secara berkelompok melalui luring dan/atau daring. Operasional Mini lokakarya Tingkat Kecamatan terdiri dari Biaya Konsumsi, transport, dan fasilitator pelaksanaan Mini lokakarya Tingkat Kecamatan. Apabila kegiatan dilakukan secara virtual maka pembiayaan dapat dialihkan dalam bentuk penggantian pulsa/data sesuai ketentuan yang berlaku. Skema gambar dibawah ini yang menggambarkan kegiatan minilokakarya di tingkat kecamatan serta pertemuan secara berjenjang dalam rangka percepatan penurunan Stunting.



a. Waktu pelaksanaan

Dilaksanakan paling sedikit minimal 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu waktu jika diperlukan, dengan diinisiasi oleh camat selaku Ketua TPPS Kecamatan.

b. Tempat Pelaksanaan

Dapat diselenggarakan di aula kantor kecamatan, balai penyuluhan atau puskesmas dana tau tempat lain yang memungkinkan untuk diadakan pertemuan.

c. Agenda Pembahasan

- 1) Verifikasi data kasus dan data sasaran risiko stunting di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan.
- 2) Monitoring dan evaluasi berkala pelaksanaan standar operasional pelayanan pendampingan keluarga berisiko stunting.
- 3) Monitoring dan evaluasi mekanisme pelaksanaan pencatatan dan pelaporan pendampingan keluarga.
- 4) Pelaksanaan pembinaan Tim Pendamping Keluarga yang terlatih.
- 5) Pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana pendampingan keluarga berisiko stunting (alat ukur, metode dan aplikasi penunjang)
- 6) Menentukan kasus yang layak diaudit dan ditatalaksana di tingkat kabupaten/kota.
- 7) Pembahasan hambatan dan tantangan pelayanan pendampingan keluarga berisiko stunting.
- 8) Penyusunan rencana tindak lanjut pelaksanaan pencegahan kasus stunting lintas sektor dan lintas pihak.

2. Materi/Media Pendukung Kegiatan :

- a. <https://monalisa.bkkbn.go.id/informasi/>
- b. Materi pendukung lain yang menunjang kegiatan pelaksanaan Mini Lokakarya Kecamatan yang dapat diakses melalui link Rumah Baca PKB/PLKB | Facebook

## **BAB V**

### **KEGIATAN DUKUNGAN OPERASIONAL PEMBINAAN PROGRAM BANGGA KENCANA OLEH KADER (PPKBD DAN SUB PPKBD)**

#### **A. Kegiatan Operasional Kader KB (PPKBD/Sub PPKBD) di Desa/Kelurahan Tanpa Tenaga Penyuluh KB/PLKB**

Kegiatan ini dilatarbelakangi dengan rasio Penyuluh KB/PLKB (ASN dan Non ASN) membina Desa/Kelurahan adalah 1 : 3, Sehingga Penyuluh KB/PLKB yang memiliki binaan wilayah 1 sampai dengan 3, dianggap wilayah tersebut tanpa tenaga Penyuluh KB/PLKB dengan maksud mengurangi beban kerja. Untuk desa/kelurahan yang memang sudah ada Penyuluh KB/PLKB paling tidak 1 orang Penyuluh KB/PLKB PNS yang berada di wilayah binaan desa/kelurahan, sedangkan desa/kelurahan yang sama sekali tidak ada Penyuluh KB/PLKB nya tersebut dapat menunjuk 1 orang kader dengan pemilihan daerah yang memang disesuaikan dengan kebutuhan prioritas pemerintah daerah misal seperti jumlah penduduknya banyak, daerah terpencil jauh dari jangkauan penyuluh KB, daerah prioritas unmet need tinggi, serta sebagainya.

Sehingga seluruh desa/kelurahan di daerah wilayah binaan Penyuluh KB/PLKB mendapatkan informasi tentang program Bangga Kencana dan upaya dalam percepatan penurunan stunting dari itu menu ini mendorong wilayah tersebut memiliki 1 orang kader yang menjadi penanggung jawab desa/kelurahan binaan tersebut. Adapun tugas yang dilakukan oleh kader di wilayah tersebut antara lain melakukan Pengelolaan Program Bangga Kencana yang meliputi penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan sama seperti tugas Penyuluh KB/PLKB. Biaya operasional ini diberikan kepada Kader KB (PPKBD dan Sub PPKBD) selama 10 bulan dengan output meningkatnya cakupan laporan Program Bangga Kencana.

Tujuan Kegiatan	Output Kegiatan
Terinformasikannya Program Bangga Kencana ke seluruh desa/kelurahan yang tidak terdapat Penyuluh KB/PLKB	Meningkatnya cakupan laporan Program Bangga Kencana di desa/kelurahan tanpa Penyuluh KB/PLKB.

#### Sasaran Kegiatan

keluarga termasuk remaja, calon pengantin/calon pasangan usia subur, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, ibu menyusui, keluarga yang memiliki anak usia 0 – 59 bulan, lansia dan anggota kelompok kegiatan/Poktan (BKB, BKR, BKL, PIK R, dan UPPKA).

## B. Kegiatan Operasional Pelaksanaan KIE

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan promosi, sosialisasi Program Bangga Kencana yang disampaikan oleh kader PPKBD/Sub PPKBD dan/atau Tenaga Lini Lapangan melalui pelayanan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) kepada sasaran langsung yaitu keluarga dan masyarakat di wilayah desa/kelurahan, kader PPKBD/Sub PPKBD di wilayah desa/kelurahan setempat dan dapat dilakukan kunjungan langsung, kelompok kegiatan, maupun dalam pertemuan lainnya. Lingkup pembiayaan operasional pelaksanaan KIE oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD) dan/atau Tenaga Lini Lapangan di wilayah kerjanya adalah biaya operasional untuk dukungan pelaksanaan promosi, KIE, penggerakan, pembinaan, pencatatan dan pelaporan/pemutakhiran data keluarga serta lainnya yang dilakukan oleh Kader (PPKBD/Sub PPKBD) minimal 10 (sepuluh) kali dalam setahun.

Tujuan Kegiatan	Output Kegiatan
Promosi dan sosialisasi Program Bangga Kencana yang disampaikan oleh Kader PPKBD / Sub PPKBD dan/atau tenaga lini lapangan	Meningkatnya kesertaan ber-KB; 2) Meningkatnya partisipasi keluarga dalam kelompok kegiatan/Poktan BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKA; dan 3) Meningkatnya partisipasi anggota keluarga untuk memeriksakan kesehatannya di Posyandu dan/atau fasilitas pelayanan Kesehatan

#### Sasaran Kegiatan

keluarga termasuk remaja, calon pengantin/calon pasangan usia subur, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, ibu menyusui, keluarga yang memiliki anak usia 0 – 59 bulan, lansia dan anggota kelompok kegiatan/Poktan (BKB, BKR, BKL, PIK R, dan UPPKA).

## **BAB VI**

### **PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN SERTA LINGKUP PEMBIAYAAN**

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilakukan untuk memastikan kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya mendukung kegiatan program prioritas nasional dalam urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana melalui dukungan anggaran DAK/BOKB Tahun Anggaran 2024 dapat terlaksana. Penjabaran kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan lebih lanjut antara lain :

#### **1. Pemantauan**

Pemantauan pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh pelaksana dan pengelola DAK Non Fisik (BOKB) Sub Bidang KB dengan memastikan kegiatan operasional berjalan, tercapainya sasaran penggunaan anggaran. Kegiatan pemantauan dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mengetahui gambaran implemementasi pelaksanaan kegiatan, permasalahan dan kendala yang terjadi di lapangan sehingga dapat diketahui bentuk permasalahan dan solusi untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang terjadi di lapangan.

#### **2. Evaluasi**

Evaluasi kegiatan bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang hasil dan manfaat kegiatan penggunaan alokasi anggaran bantuan operasional. Kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan frekuensi yang telah disebutkan dalam Peraturan BKKBN Nomor 14 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan di tahun berjalan dan perencanaan kegiatan di tahun selanjutnya.

### 3. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran dilaporkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan BKKBN Nomor 14 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024. Pelaporan agar dilakukan secara rutin disajikan tepat waktu, terjamin akurasinya, tertib dan teratur.

### 4. Lingkup Pembiayaan

Lingkup pembiayaan dukungan kegiatan penggunaan anggaran DAK Sub Bidang KB Tahun Anggaran 2024 baik dukungan anggaran kegiatan operasional di menu Balai Penyuluhan KB dan menu operasional penurunan Stunting mengacu kepada Peraturan BKKBN Nomor 14 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024.



## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Dukungan sarana dan prasarana serta dukungan anggaran di tingkat lini lapangan sangat diperlukan dalam perencanaan, pelaksanaan yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan capaian program Bangga Kencana sampai kepada tingkatan yang paling bawah yakni desa/kelurahan dan juga sampai langsung kepada keluarga sebagai penerima manfaat yang paling dasar. Peran dan fungsi Balai Penyuluhan KB tingkat kecamatan dalam peningkatan Program Bangga Kencana dan Pusat Pengendali Bangga Kencana dan Penurunan Stunting merupakan fasilitas di tingkatan kecamatan yang sangat strategis untuk dapat dimanfaatkan sebagai tempat pusat pengendalian data, konsultasi, pembinaan, perencanaan dan melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesertaan ber-KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas.

Buku Panduan Pelaksanaan Kegiatan Operasional di Balai Penyuluhan KB Tahun 2024 agar dijadikan acuan oleh semua pihak dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota serta para pengelola program Bangga Kencana di lini lapangan.

Program Percepatan Penurunan Stunting dapat terselenggara dengan baik dan tercapainya target RPJMN dalam prioritas peningkatan SDM yang berkualitas dan terwujudnya penurunan angka Stunting sesuai dengan target 14% dari yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan kegiatan agar disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerah setempat sehingga mudah diterima oleh masyarakat. Komitmen dan dukungan pemerintah daerah dan semua pihak sangat dibutuhkan sehingga mencapai hasil yang optimal.

# LAMPIRAN

**LAMPIRAN 1**  
**DATA BALAI PENYULUHAN KB**

No	PROVINSI/KAB KOTA	Jumlah Kecamatan	Data Basis 2024
1	Provinsi Aceh	290	290
2	Provinsi Sumatera Utara	455	430
3	Provinsi Sumatera Barat	179	179
4	Provinsi Riau	172	154
5	Provinsi Jambi	144	142
6	Provinsi Sumatera Selatan	241	220
7	Provinsi Bengkulu	129	129
8	Provinsi Lampung	229	212
9	Provinsi DKI Jakarta	44	44
10	Provinsi Jawa Barat	627	485
11	Provinsi Jawa Tengah	576	576
12	Provinsi DI Yogyakarta	78	65
13	Provinsi Jawa Timur	666	614
14	Provinsi Kalimantan Barat	174	174
15	Provinsi Kalimantan Tengah	136	124
16	Provinsi Kalimantan Selatan	156	155
17	Provinsi Kalimantan Timur	105	72
18	Provinsi Sulawesi Utara	171	165
19	Provinsi Sulawesi Tengah	175	175
20	Provinsi Sulawesi Selatan	311	309
21	Provinsi Sulawesi Tenggara	220	214
22	Provinsi Bali	57	48
23	Provinsi Nusa Tenggara Barat	117	117
24	Provinsi Nusa Tenggara Timur	315	287
25	Provinsi Maluku	118	106
26	Provinsi Papua	566	66
27	Provinsi Maluku Utara	118	114
28	Provinsi Banten	155	111
29	Provinsi Bangka Belitung	47	47
30	Provinsi Gorontalo	77	77
31	Provinsi Kepulauan Riau	76	54
32	Provinsi Papua Barat	218	47
33	Provinsi Sulawesi Barat	69	70
34	Provinsi Kalimantan Utara	55	29
35	Provinsi Papua Selatan	82	29
36	Provinsi Papua Tengah	131	69
37	Provinsi Papua Pegunungan	252	74
	<b>TOTAL</b>	<b>7,266</b>	<b>6,353</b>

• Data Jumlah Balai Penyuluhan berdasarkan BNBA Provinsi

# LAMPIRAN 2 – (K/O/BP/2020)

KARTU PENDAFTARAN SARANA BANGGA KENCANA  
BALAI PENYULUHAN KKB

K/O/BP/20

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kode Provinsi	Kode Kabupaten/ Kota	Kode Kecamatan	Nomor Registrasi Balai Penyuluhan

**A. IDENTITAS**

1. NAMA BALAI : \_\_\_\_\_

2. ALAMAT :

a. Jalan : \_\_\_\_\_

b. Desa/Kelurahan : \_\_\_\_\_

c. Kecamatan : \_\_\_\_\_

d. Kabupaten/Kota : \_\_\_\_\_

e. Provinsi : \_\_\_\_\_

**B. INFORMASI**

1. STATUS KEPEMILIKAN :  1. Sendiri  2. Alih Fungsi  3. Hibah  4. Lainnya \_\_\_\_\_

2. SUMBER DANA KEGIATAN :  1. APBN  2. APBD  3. DAK  4. Lainnya \_\_\_\_\_

**C. PENGURUS**

NO.	JABATAN (Kode)	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)	NAMA	NO. HANDPHONE
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

Kode Jabatan : 1 : PKB 2 : PLKB 3 : PLKB Non PNS

**D. KETERSEDIAAN SARANA**

SARANA INFORMASI	KETERSEDIAAN	ALAT BANTU PENYULUHAN	KETERSEDIAAN
<b>SARANA INFORMASI</b>	<b>ADA TIDAK</b>	<b>ALAT BANTU PENYULUHAN</b>	<b>ADA TIDAK</b>
1. Papan Nama Balai Penyuluhan	<input type="text"/>	1. LCD Proyektor	<input type="text"/>
2. Komputer	<input type="text"/>	2. Pengeras Suara (Megaphone, Mic)	<input type="text"/>
3. Printer	<input type="text"/>	3. Monitor TV dan VCD/DVD Player	<input type="text"/>
4. Kamera	<input type="text"/>	4. Tape Recorder	<input type="text"/>
5. Handycam	<input type="text"/>	5. Whiteboard/Panelboard	<input type="text"/>
6. Telepon/Mobile Phone dan Mesin Fax	<input type="text"/>	6. Laptop	<input type="text"/>
<b>PERPUSTAKAAN</b>	<b>ADA TIDAK</b>	<b>PERLENGKAPAN RUANG DAN ADMINISTRASI</b>	<b>ADA TIDAK</b>
1. Buku-buku Program KKBPBPK	<input type="text"/>	1. Ruangan Administrasi	<input type="text"/>
2. Buku-buku, Panduan, Lembar Balik Kits	<input type="text"/>	2. Ruangan Kerja	<input type="text"/>
3. Publikasi dan Dokumentasi	<input type="text"/>	3. Ruangan Pertemuan	<input type="text"/>
4. VCD/DVD Materi Penyuluhan	<input type="text"/>	4. Mesin Tik	<input type="text"/>
5. Peta PUS	<input type="text"/>	5. Kalkulator	<input type="text"/>
		6. Brankas	<input type="text"/>
		7. Filing Cabinet/Rak Buku	<input type="text"/>
		8. Almari, Meja, Kursi	<input type="text"/>

Mengetahui,  
Kepala PD KB Kab/Kota

Pimpinan Balai  
(Ka. UPT/koord. PKB/PLKB)

(.....)

(.....)



## LAMPIRAN 4

### SPEKIFIKASI PEMBANGUNAN/REHABILITASI/KELENGKAPAN BALAI PENYULUHAN KB BERDASARKAN LAMPIRAN PERPRES NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2024

Pembangunan/Rehabilitasi/Kelengkapan balai penyuluhan KB

a) Pembangunan balai penyuluhan KB

Spesifikasi

- (1) Luas bangunan: minimal 10 m x 5 m (50 m<sup>2</sup>). Jika tidak tersedia luas lahan minimal 50 m<sup>2</sup> dapat dibangun menjadi bangunan 2 (dua) lantai;
- (2) Standar ruangan, harus tersedia:
  - (a) ruang pertemuan;
  - (b) ruang kerja;
  - (c) toilet;
  - (d) ruang perpustakaan (optional);
  - (e) ruang saji dan wastafel (optional); dan
  - (f) tempat untuk mencuci tangan (wajib).
- (3) bahan bangunan berkualitas tinggi;
- (4) Identitas balai penyuluhan KB meliputi:
  - (a) balai penyuluhan KB;
  - (b) kecamatan;
  - (c) jalan;
  - (d) kabupaten dan kota;
  - (e) provinsi;
  - (f) Logo BKKBN: Sesuai logo asli;
  - (g) Logo kabupaten: Sesuai logo asli;
  - (h) DAK Bidang KB Tahun ....;
  - (i) Bahan dasar: disesuaikan dengan kebutuhan daerah; dan
  - (j) Lokasi: bagian yang mudah dilihat oleh masyarakat.
- (5) pada atap bagian depan dan belakang terpasang slogan "Berencana itu Keren" (sesuai dengan warna asli berbahan cat genting);

Contoh Slogan pada Atap Bagian Depan dan Belakang

**BERENCANA ITU KEREN**

- (6) Tersedia fasilitas jalan masuk bagi pengguna kursi roda (optional): *paving block*, tanah, plesteran semen, beton (disesuaikan dengan ketersediaan daerah) dicat warna putih (terang) tanpa anak tangga dengan logo kursi roda dengan cara dicat warna hitam (ukuran logo disesuaikan dengan lebar jalan) lebar minimum 1,5 m;

Contoh Logo Kursi Roda pada Jalan Masuk



- (7) Pembuatan Pagar Balai Penyuluhan KB :
- (a) balai penyuluhan KB yang dibangun di dalam area kantor camat tidak perlu dilengkapi dengan pagar;
  - (b) balai penyuluhan KB yang dibangun di luar area camat atau area lainnya dapat dilengkapi dengan pagar dengan mempertimbangkan kondisi luas lahan dimana balai penyuluhan KB dibangun;
  - (c) konstruksi pagar bisa menggunakan besi *hollow*, batako, bata atau beton bertulang;
  - (d) tinggi pagar minimum 120 cm, tebal pagar minimum 15 cm (untuk batako, bata dan beton);
  - (e) pagar dapat dibangun mengelilingi bangunan; dan
  - (f) pintu gerbang lebar minimum 1,5 m dengan menggunakan pintu *sliding* (*sliding door*) berbahan besi.
- b) Rehabilitasi (pengembangan) balai penyuluhan KB
- Spesifikasi
- (1) Standar ruangan, harus tersedia:
    - (a) ruang pertemuan;
    - (b) ruang kerja;
    - (c) toilet;
    - (d) ruang perpustakaan (optional);
    - (e) ruang saji dan wastafel (optional); dan
    - (f) tempat untuk mencuci tangan (wajib).
  - (2) bahan bangunan berkualitas tinggi; dan
  - (3) dapat ditambahkan atap tambahan/kanopi dibagian teras atau luar balai penyuluhan KB sehingga dapat digunakan sebagai tempat pertemuan luar ruangan yang berfungsi untuk menahan panas, ruangan yang teduh dan tidak terlindung dari hujan.

c) Kelengkapan balai penyuluhan KB

Spesifikasi

- (1) kursi dan meja rapat disediakan sesuai kebutuhan;
- (2) kursi dan meja kerja disediakan sesuai kebutuhan;
- (3) almari (minimal 1 buah);
  
- (4) *Exhaust fan*: (minimal 4 buah) dipasang kanan, kiri dan belakang dan plafon bangunan;
- (5) Kipas angin dan/atau AC : (maksimal 3 buah dipasang di ruang rapat dan ruang kerja) ketersediaan disesuaikan dengan kondisi daerah;
- (6) Rak : (minimal 1 buah);
- (7) *White board* : (minimal 1 buah);
- (8) Meja rapat : (minimal 2 buah);
- (9) Tempat sampah : (minimal 2 buah);
- (10) *Generator set* : 5–10 kva;
- (11) pengadaan dan pemasangan mesin pompa air listrik dengan spesifikasi yaitu daya 100-300 *watt*, *voltage* 220-240 volt;
- (12) LCD dan layar LCD;
- (13) *dispenser*;
- (14) tempat penampungan air (*water tank*);
- (15) Pengadaan *personal computer* dan/atau *printer* dengan spesifikasi :
  - (a) *Personal computer*
    - i. *processor* minimal setara i5;
    - ii. memori minimal: 8 GB;
    - iii. *storage* minimal 512 Gb *hybrid* (HDD dan SSD) atau SSD; dan
    - iv. *operating system* (OS) minimal Windows 10 Pro 64 *bit* atau OS lainnya yang tersedia.
  - (b) *Printer all in one*
    - i. tinta hitam dan tinta warna;
    - ii. memiliki *scanner* atau pemindai dokumen; dan
    - iii. memiliki fungsi untuk *copy* dokumen.
- (16) panel surya (*solar cell*); dan
- (17) kelengkapan *Wi-Fi*.

## **DAFTAR REFERENSI:**

1. Pedoman Tim Pendamping Keluarga - Direktorat Bina Penggerakan Lini Lapangan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2022, Jakarta
2. Pedoman Mekanisme Operasional Penggerakan dalam Percepatan Penurunan Stunting di Lini Lapangan - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, 2022, Jakarta
3. Modul Aplikasi ELSIMIL TPK - Pusdiklat KKB, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, 2022, Jakarta



bkkbn



DIREKTORAT BINA PENGGERAKAN LINI LAPANGAN  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
Jln. Permata No. 1 Halim Perdanakusuma - Jakarta Timur

BERENCANA ITU KEREN

 @BKKBNofficial



62 - 3291 - 2780 - 451